

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukan hal baru dalam tatanan masyarakat, di era industri 4.0 perkembangan kejahatan justru lebih berkembang dan modern serta modus kejahatan ikut berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini di sebabkan karena kejahatan selalu ada dalam masyarakat sebagai akibat dari kehidupan bersama yang di dalamnya disebabkan berbagai faktor.

Menurut Prof Dr W.M. Noach bahwa sesungguhnya kejahatan tidak bisa dihilangkan di dalam tatanan masyarakat, yang mungkin adalah hanya mengurangi atau membatasi adanya kejahatan tersebut. Pernyataan tersebut senada dengan apa di katakan oleh Barnes & Teeters, bahwa kejahatan akan selalu menerus ada, seperti adanya penyakit dan kematian terhadap manusia yang selalu terjadi serta berulang-ulang adanya, seperti halnya musim yang akan berganti-ganti dari tahun ke tahun.⁸

Sudarto berpedapat pencegahan terhadap kejahatan dapat dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Pencegahan langsung yaitu dengan cara :
- b. Pengamanan sarana prasarana fisik untuk menghilangkan kesempatan, seperti lampu penerangan, pagar lemari, besi dll
- c. Penjagaan atau patrol

⁸ Robby Firmansyah, Skripsi, *Upaya Kepolisian Dalam Menekan Angka Pencurian Dengan Kekerasan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Ikan (Bondet) Berdasarkan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak*, 2010, Hal 61.

- d. Perbaikan struktur sosial dan ekonomi
- e. Menghindari hubungan dengan pelaku potensial
- f. Perbaikan peraturan yang kurang sempurna
- g. Pencegahan dengan cara tidak langsung, yaitu berupa :
- h. Penyuluhan/pendidikan/pembinaan moral
- i. Penimbunan kesa adanya suatu pengawasan.⁹

Selain itu upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

1. Terdapat keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Terdapat keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan terhadap upaya represif yaitu penindakan ketika kejahatan sudah terjadi sedangkan jalur non-penal lebih terhadap upaya preventif berupa upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Berdasarkan uraian diatas maka secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat di bagi menjadi dua yaitu upaya penal dan non penal.

a. Upaya Penal

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan penanggulangan kejahatan melalui upaya penal bisa juga disebut upaya melalui jalur hukum pidana¹⁰.

Hal ini lebih menitik beratkan terhadap upaya represif, yakni dilakukan pada

⁹ *Ibid*, hal 63.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Penerbit Interpratama, hal 45

saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman¹¹. Meskipun upaya penal bersifat represif namun terdapat juga unsur upaya preventif, karena dengan adanya penjatuhan pidana terhadap delik maka diharapkan adanya efek pencegahan atau penagkalnya (*deterrent effect*). Disamping itu kebijakan penal sangat diperlukan dalam upaya penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu upaya kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat atau kebencian sosial dan sekaligus digunakan menjadi sarana perlindungan sosial.¹² bahwa berdasarkan yang disampaikan Barda Nawawi Arief dapat ditarik kesimpulan penggunaan upaya penal sangat diperlukan dalam menanggulangi kejahatan, selain mengandung unsur represif juga terdapat unsur preventif sehingga masyarakat taat terhadap hukum dan berfikir lagi untuk melakukan tindak pidana.

b. Upaya Non-Penal

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal bisa juga disebut upaya melalui diluar jalur hukum pidana.¹³ Hal ini menitik beratkan terhadap upaya preventif, Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali.¹⁴ Melalui upaya non

¹¹ Dalam A.S Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Jakarta, Penerbit Prenada Media Grup, Hal 92

¹² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Penerbit Kencana Predana Media Grup, hal 182

¹³ Barda Nawawi Arief, Op.cit, Hal 46.

¹⁴ A.S Alam dan Amir Ilyas, Op.cit, Hal 92

penal sasaran utamanya faktor - faktor kondusif terjadinya kejahatan. Upaya non-penal dapat dilakukan dalam bentuk seperti : penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial ; penggarapan sosial kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dll ; peningkatan kesejahteraan remaja serta anak ; dan kegiatan patrol yang dilakukan oleh para pihak polisi dan alat Negara lainnya. Adapun tujuan utamanya merupakan upaya prefentif melalu perbaikan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat sehingga dengan demikian kegiatan tersebut mempunyai kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan agar mewujudkan tujuan dari politik Kriminal.¹⁵

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan mulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, dan evaluasi hukum. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan yang berada dalam bingkai aturan yang telah disepakiti bersama. Penegakan hukum tidak dapat dianggap semata-mata sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik.¹⁶ Namun penegakan hukum memiliki dimensi yang sangat luas menurut Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman mengajarkan tiga

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hal 159.

¹⁶ Zudan Arif Fakrulloh, 2005, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Jurnal Jurisprudence Vol.2 No.1, Hal 22.

unsur dasar hukum, hal ini dikemukakan pada masa era Perang Dunia II, adapun tiga dasar hukum tersebut adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan, hal ini diidentikkan sebagai dari tujuan hukum¹⁷.

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum sesuai dengan yang kewenangannya dan kepentingannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian adanya penyelerasian penegakan hukum antara kaidah-kaidah dengan perilaku manusia. Kaidah-kaidah tersebut akan menjadi pedoman tindak tanduk manusia agar terjadi ketertiban dan kedamaian di dalam tatanan masyarakat. Jimly Asshiddiqie menyatakan penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁸

Menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum merupakan sebagai kegiatan menyelerasikan nilai-nilai dalam kehidupan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dari sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Pendapat serupa disampaikan oleh Liliana Tedjosaputro, mengatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya sebatas *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena itu penegakan hukum merupakan

¹⁷ Samsul Wahidin, 2017, *Politik Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, Hal 51.

¹⁸ Rusdianti Hadi Sarosa, Tesis, *Relevansi Penegakan Hukum Pasal 2 Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam (Studi Di Wilayah Malang Hukum Kepolisian Sektor Lekok Kabupaten Pasuruan)*, 2013, Hal 27.

penyelarasan antara nilai-nilai atau kaidah – kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.¹⁹

Konsep penegakan hukum menurut Lawrence M.friedman terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni :

1. Subtansi Hukum

Dalam teori Lawrence M.Friedman, subtansi hukum diartikan sebagai untuk menentukan bisa atau tidaknya sebuah undang-undang itu dilaksanakan.²⁰

2. Struktur Hukum

Struktur hukum memiliki peranan yang menentukan bisa atau tidaknya sebuah undang-undang dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini yang memiliki tugas dan kewenangan adalah para penegak hukum yang dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya.²¹

3. Budaya hukum

Budaya Hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial, untuk menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Budaya hukum ini berkaitan erat dengan kesadaran hukum didalam masyarakat. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan semakin tinggi maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.²²

¹⁹ *Ibid*, Hal 28.

²⁰ Slamet Tri Wahyudi, 2012, *Problematika Penerapan Hukum Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.1 No.2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Hal 217.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, Hal 218.

Kemudian di kembangkan oleh Soerjono Soekanto, yang terdapat lima unsur-unsur faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yakni :

- 1) Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan juga sebagai tolak ukur dalam efektivitas penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai salah satu tindakan yang dapat dikatakan upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kepastian. Bentuk nyata dari penegakan hukum adalah tindakan pelaksanaan penegakan hukum yang tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dalam melaksanakan peranan yang actual aparat penegak hukum harus mampu memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat serta ditaatinya hukum materil dengan cara-cara yang bersifat prosedural yang telah di atur dalam hukum formil. Untuk menyelaraskan tujuan penegakan hukum tersebut sangat ditentukan oleh tingkat profesionalisme aparat penegak hukum baik dalam segi keterampilan maupun kemampuan dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun didalam penerapannya.

²³ Dalam Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit CV. Rajawali, Hal 8.

C. Tinjauan Teoritis Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polri

Ditinjau dari segi etimologi istilah polisi yang ragam penyebutannya di beberapa negara memiliki tidak kesamaan, seperti di Yunani istilah polisi di sebut dengan “ *Politeia*”, di Inggris “*police*” selain itu dikenal dengan istilah “*constable*” , di Jerman “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan istilah “*sheriff*” di Belanda “*politie*” di Jepang “*koban*” dan “*chuzaisho*” walaupun sebenarnya istilah koban merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan chuzaisho adalah polisi di wilayah perdesaan.²⁴ Istilah “polisi” pertama kali berasal dari Yunani dikenal dengan sebutan “*politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal dan memiliki cita-cita yakni negara yang bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat, tempat keadilan di junjung tinggi.²⁵

Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” sebagaimana di kutip oleh Momo Kelana istilah “*Politie*” mengandung arti sebagai organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah²⁶ Dilihat dari segi Historis istilah polisi di Indonesia tampaknya telah mengikuti istilah “*politie*” dari Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia.

²⁴ Dalam Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Penerbit LaksBan PRESSindo, Hal 1.

²⁵ *Ibid*, Hal 1-2.

²⁶ *Ibid*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepolisian bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Bahwa polisi diartikan : 1) badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), 2) anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Dengan demikian arti polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan dan sebagai sebutan anggota dari lembaga.²⁷

Momo Kelana menyatakan istilah polisi ada dua arti, yang pertama polisi dalam arti formal yang mencakup organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian dan yang kedua dalam arti material yang memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan ketertiban dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁸

Menurut Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye Of History* mengemukakan pengertian polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Dalam *Encyclopaedia and Social Science* menyebutkan bahwa polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum.²⁹

²⁷ *Ibid* , Hal 4.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Fikri Latukau, 2019, *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Jurnal Tahkim, Vol.XV No 1, Program Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Paadadjaran Bandung, Hal 3.

Menurut Sajipto Raharjo, polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat.³⁰ Selanjutnya Sajipto Raharjo mengutip pendapat Bitner yang menyatakan bahwa apabila hukum untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat diantaranya yaitu melawan kejahatan, secara kongkrit akhirnya polisi yang menentukan apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi mengenai dengan Polisi. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.³²

2. Fungsi dan Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Fungsi berasal dari bahasa Inggris “*function*”. Menurut kamus Webster, *function* berarti *performance, the special work done by an structure*. Dari uraian tersebut

³⁰ Dalam Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, Hal 111.

³¹ *Ibid*, Hal 117.

³² Sadjijono, *Op.Cit*, Hal 5.

bahwa fungsi merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai sebuah tujuan³³

Fungsi Kepolisian berkaitan dengan *Good Governance* yakni sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban, yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintah. Perumusan fungsi kepolisian tiap-tiap negara berbeda-beda, ada polisi yang secara kondisi sosial menempatkan polisi sebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga status quo dan menjalankan hukum saja.³⁴

Menurut Sajipto Raharjo tipe polisi yang pertama berada bersama-sama dengan rakyat tersebut disebut polisi yang “*protagonist*” dan tipe kedua yakni sekedar menjaga status a quo dan tahu menjalankan hukum saja disebut dengan “*antagonis*”. Bahwa polisi di Indonesia di lain sisi berada di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan disisi lain harus menegakkan hukum dan menjaga pemerintahan Negara.³⁵

Egon Bittner menyatakan, bahwa fungsi utama kepolisian adalah untuk menghentikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dan mendorong seseorang agar berbuat lebih baik serta polisi turun tangan dan menenangkan suasana yang potensial atau terus menerus menimbulkan konflik. Jadi fungsi polisi sangat luas, tidak hanya terbatas pada hal-hal kejahatan saja yang telah

³³ Dalam Cristine Kansil, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 56

³⁴ Robby Firmansyah, *Op.Cit*, Hal 16.

³⁵ Sadjijono, *Op.cit*, Hal 123-124.

muncul menjadi ancaman yang faktual, akan tetapi hal-hal yang masih dibawah permukaan yang berupa faktor korelasi kriminogin sudah memerlukan adanya tindakan kepolisian.³⁶

Pemikiran pembentukan Kepolisian itu sendiri dalam suatu Negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam negara, yang dapat mengakibatkan kegiatan atau aktifitas masyarakat menjadi terganggu.³⁷ Dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan :³⁸

“ Fungsi Kepolisian Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ”

Fungsi kepolisian berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga kepolisian yang dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut. Secara umum telah dijelaskan tujuan diciptakannya lembaga kepolisian agar menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas kepolisian dapat dibagi dua golongan melalui tugas preventif dan tugas represif.³⁹

Tugas-tugas di bidang Preventif dilaksanakan dengan konsep menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Robby Firmansyah, *Op.Cit*, Hal 18

³⁸ Lihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

³⁹ Dalam Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Penerbit PTIK, Hal 20

sedangkan di bidang represif adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yakni menjalankan peraturan apabila telah terjadi pelanggaran hukum.⁴⁰ Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum yang dibebankan kepada petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Harsja W Bachtiar, bahwa petugas kepolisian dibebani tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat mengenai tindakan terhadap tindakan kejahatan.⁴¹

Tugas Kepolisian selain sebagai alat Negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, ciri-ciri demikianlah kerja kepolisian, disatu sisi untuk memelihara ketertiban dan sisi lain harus memeliharanya dengan jalan hukum.⁴²

Dalam pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia⁴³:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴⁰ Muhammad Guntur, 2017, *Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo*, Makasar, Jurnal Al-Hikam, Universitas Muslim Indonesia Makasar, Vol 1. No 3, Hal 66.

⁴¹ Dalam Harsja W, Bachtiar, 2008, *Hukum Kepolisian Polri and Good Government*, Yogyakarta, Penerbit LaksBang Mediatama, Hal 195.

⁴² Robby Firmansyah, *Op.cit*, Hal 21.

⁴³ Lihat dalam Pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Subtansi tugas pokok Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan subtansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan yang terakhir subtansi dari tugas pokok polisi untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang ada pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk kewajiban dari kewajiban umum Kepolisian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Polri diatur di dalam pasal 14 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas⁴⁴ :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

⁴⁴ Lihat dalam Pasal 14 Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

- memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;*
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta*
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

D. Tugas Pencegahan Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang mengemban fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain polisi disini sebagai kekuasaan untuk menegakkan dan mentertibkan warga negara yang tidak taat atau menentang terhadap aturan-aturan yang telah dibuat, sehingga polisi lahir karena adanya fungsi polisi yang bertindak untuk mengingatkan warga negara untuk taat terhadap sebuah peraturan.⁴⁵ Fungsi Kepolisian berkaitan erat dengan tugas dan wewenang dari Kepolisian itu sendiri yang salah satu nya memiliki tugas yang disebut dengan tugas preventif (pencegahan).

Tugas di bidang preventif dilakukan dengan pola-pola dan konsep pembinaan dalam bentuk pemberian pengayoman, perlindungan serta pelayanan terhadap masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih aman, tertib dan tentram serta segala aktivitas yang dilakukan tidak dapat terganggu. Tugas preventif tidak terlepas dari faktor-faktor yang dihadapi secara teoritis dan teknis kepolisian yaitu mencegah adanya faktor korelasi Kriminologin (FKK) tidak berkembang

⁴⁵ Dalam Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Surabaya, Penerbit Laksbang Mediatama, Hal 194.

menjadi Police Hazard (PH) dan muncul sebagai ancaman faktual (AF). Karena didalam formulasi tindak kriminalitas apabila niat dan kesempatan bertemu, maka kriminalitas atau kejahatan ($n + k = c$), maka dari itu langkah preventif merupakan usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan untuk berbuat jahat, sehingga tidak dapat terjadinya kriminalitas.⁴⁶

Faktor Korelasi Kriminogin (FKK) merupakan kondisi yang padat mampu membuat mentimulir terjadinya Police hazard dan ancaman faktual, sedangkan Police Hazard (PH) merupakan kondisi yang mampu atau yang sangat potensial untuk terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam tatanan masyarakat dan ancaman faktual merupakan ancaman nyata untuk terjadinya tindak pidana kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Maka dari itu tugas preventif ini dilakukan di awal dalam mencegah kejahatan dengan cara melakukan penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli polisi dan lain-lain untuk sebagai teknis dasar kepolisian.⁴⁷ Hal tersebut membawa dampak positif agar mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga pihak kepolisian dapat mendeteksi aktivitas yang dilakukan di suatu tempat yang apabila suatu hari ditemukan suatu hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan mudah menanggulangi kejahatan tersebut

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, Hal 195.

E. Tinjauan Tentang Larangan Bahan Peledak (Bondet)

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78) menyatakan⁴⁸ :

" Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun "

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78 menyatakan :

" Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat- granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukanbahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi "

⁴⁸ Lihat pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak